

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Umum		
OPD yang Dinilai	: Inspektorat Daerah		
Sumber Data	: RPJMD Kab. Gunungkidul, Renstra Inspektorat Daerah		
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik		
Sasaran Strategis	1. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat		
IKU Renstra OPD		IKU	2025
	1	Nilai Maturitas SPIP	3,89
IKK Kabupaten untuk	1	Nilai AKIP PD	82,5
	2	Nilai Maturitas SPIP	3,89
Program	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%
	2	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	100%
	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	1	Nilai AKIP PD	82,5
	2	Nilai Maturitas SPIP	3,89
	3		
	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
	2	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	
	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	

Gunungkidul, 24 Juni 2024
 Ketua UPR Inspektorat Daerah

 Saptoyo, S. Sos, M. Si
 NIP. 197103251991011001

[illegible]

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis uraian wajib sebagai acuan dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ bertanggung jawab mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

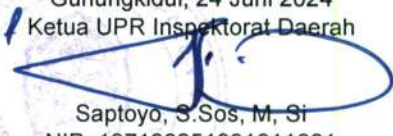
Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY		
Tahun Penilaian	: 2025		
Periode yang dinilai	: 2025		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Umum		
OPD yang Dinilai	: Inspektorat Daerah		
Sumber Data	Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal		
Program dan Kegiatan Utama	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
Keluaran/Hasil Kegiatan			
	Program/Kegiatan	Indikator	Target
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	100%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	4 layanan
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	120 Dokumen
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	100%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	9 Dokumen
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	3 Layanan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten terlaksana dengan baik	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Layanan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	29 Dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	49 Orang
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	5 Layanan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	48 Unit
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	3 Layanan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Layanan
Gunungkidul, 24 Juni 2024 Ketua UPR Inspektorat Daerah  Saptoyo, S.Sos, M. Si NIP. 197103251991011001			

Identifikasi Risiko Operasional Inspektorat Daerah

Identifikasi Risiko Operasional Inspektorat Daerah											
Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY											
Nama OPD : Inspektorat Daerah											
Tahun Penilaian : 2025											
Periode yang dinilai : 2025											
Tujuan Strategis : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal											
Sasaran strategis OPD : Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat											
Urusan Pemerintahan : Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat											
Urusan Pemerintahan Umum											
Program/Kegiatan		Indikator Keluaran	Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Dampak**)
No	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	ROO 25.35.03.01	Auditor, Sekretaris	kurangnya pemahaman audit atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	eksternal	C	Keterlambatan penyajian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	Pelaksanaan	Pengawasan tidak tepat sasaran	ROO 25.35.03.02	Kasubbag Perencanaan, Auditor dan P2UPD	Belum disusun manajemen resiko pada Audit, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Internal dan Eksternal	C	Pengawasan internal tidak optimal	Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	Pelaksanaan Pengawasan tidak tepat waktu	ROO 25.35.03.03	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Auditor dan P2UPD	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Internal dan Eksternal	C	Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Reviu	Inspektorat Daerah
			Pelaksanaan	Keterbatasan waktu pelaksanaan pengawasan	ROO 25.35.03.04	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Auditor dan P2UPD	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Internal dan Eksternal	C	Hasil pengawasan tidak optimal	Inspektorat Daerah
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP Audit dengan tujuan tertentu	ROO 25.35.03.05	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan	kurangnya pemahaman audit atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Internal dan Eksternal	C	target waktu tindak lanjut tidak tercapai	Inspektorat Daerah
			Pelaksanaan	Pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan standar dan kriteria	ROO 25.35.03.06	Inspektur	Kurangnya kompetensi auditor	Internal	C	Tujuan audit tidak tercapai	Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	Pemeriksaan tidak objektif	ROO.25.35.03.07	Inspektur	Fraud	Internal dan Eksternal		Tujuan audit tidak tercapai	Inspektorat Daerah dan Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	Keterlambatan Penyusunan laporan	ROO.25.35.03.08	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya koordinasi Satgas saber pungi	Internal dan Eksternal	C	target tidak tercapai	Inspektorat Daerah
			Pelaksanaan	terjadinya kasus pungli di Lingkungan Pemerintah Daerah	ROO.25.35.03.09	Inspektur	Integritas SDM	Internal dan Eksternal	C	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah, Negara	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Negara
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN	Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	Pelaksanaan	Manajemen Risiko belum dilaksanakan oleh OPD	ROO.25.35.03.10	Sekretaris	Keterbatasan pengetahuan OPD	Internal dan Eksternal	C	Pengendalian atas risiko kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan terlaksana	Pelaksanaan	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu	ROO.25.35.03.11	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	Internal dan Eksternal	C	tujuan kebijakan teknis tidak tercapai secara optimal	Inspektorat Daerah
			Perencanaan	Penetapan obyek pemeriksaan belum berdasarkan risiko	ROO.25.35.03.12	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Belum disusun manajemen risiko pada Audit, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Internal dan Eksternal	C	Pelaksanaan pemeriksaan tidak optimal	Inspektorat Daerah
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	Pelaksanaan	Perbedaan rekomendasi atas kondisi yang sama/mirip	ROO.25.35.03.13	Auditor	Perbedaan persepsi antar tim pendamping Kalurahan/OPD dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi	internal	C	Penurunan kepercayaan publik	Inspektorat Daerah
			Pelaksanaan	Peningkatan kasus fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.35.03.14	Inspektur Pembantu	Animo pegawai /masyarakat dalam melaporkan fraud rendah	eksternal	C	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah, Negara	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Negara
			Pelaksanaan	Adanya benturan kepentingan dalam pelayanan pemerintah Kabupaten	ROO.25.35.03.15	Inspektur Pembantu	kurangnya pemahaman PD terhadap mekanisme penanganan benturan kepentingan	Eksternal dan Internal	C	Pelayanan Pemerintah daerah tidak obyektif	Masyarakat
			Pelaksanaan	Penyajian bukti dukung ZI / WBK / WBBM tidak tepat	ROO.25.35.03.16	Inspektur Pembantu	Kurangnya pemahaman dari PD terpilih	Eksternal dan Internal	C	hasil evaluasi ZI WBK rendah	Pemerintah Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaksanaan	belum semua PD melaporkan gratifikasi	ROO 25.35.03.17	Inspektur	kurangnya pemahaman PD terhadap Mekanisme pelaporan gratifikasi	Internal dan Eksternal	C	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Negara
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten terlaksana	Pelaksanaan	Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan tidak	ROO 25.35.03.18	Sekretaris	Keterbatasan SDM	Internal	C	Penyelenggaraan pelayanan Publik tidak Optimal	Inspektorat Daerah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan	Perencanaan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan	ROO 25.35.03.19	Sekretaris	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Pelaksanaan	Penyajian perencanaan tidak tepat waktu	ROO 25.35.03.20	Kasubag Perencanaan	Keterbatasan waktu perencanaan, pengumpulan data dari pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Internal	C	Perencanaan Daerah terganggu	Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	ROO 25.35.03.21	Kepala subbag perencanaan	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	Internal	C	Pertanggungjawaban tidak efisien dan ekonomis serta berpotensi atas adanya temuan	Inspektorat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	Pelaksanaan	penatausahaan keuangan tidak akurat	ROO 25.35.03.22	Kepala Subbag Umum	verifikasi berjenjang kurang optimal	Internal	C	Merugikan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah
			Pelaksanaan	penatausahaan keuangan tidak tepat waktu	ROO 25.35.03.23	Kepala Subbag Umum	koordinasi internal kurang optimal	Internal	C	Laporan keuangan tidak bisa disajikan tepat waktu	Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Pelaksanaan	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu	ROO 25.35.03.24	Kasubag Umum	Kurangnya Koordinasi Internal	Internal	C	Penundaan hak kepegawaian pegawai Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum terlayani	Perencanaan	pelayanan administrasi umum tidak optimal	ROO 25.35.03.25	Kasubag Umum	keterbatasan layanan yang dapat dilaksanakan	Internal dan Eksternal	C	Pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah tidak optimal	Inspektorat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Perencanaan	Pengadaan BMD Penunjang tidak optimal	ROO 25.35.03.26	Kepala Subbag Umum	keterbatasan BMD yang dapat diadakan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Pelaksanaan	Kemahalan harga pengadaan	ROO 25.35.03.27	Kepala Subbag Umum	Fraud	Internal dan Eksternal	C	Merugikan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Pelaksanaan	Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal	ROO 25.35.03.28	Kasubag Umum	Kurangnya koordinasi internal	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO 25.35.03.29	Kasubag Umum	Perubahan kebutuhan pemeliharaan berubah sesuai dengan perkembangan di	Internal	C	Pemeliharaan kurang optimal

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom f diisi dengan Kode risiko
- Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material
- Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Hasil Analisis Risiko

Nama Perangkat Daerah Tahun Penilaian Tujuan Strategis			: Inspektorat Daerah : 2025 : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal : Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat : Urusan Pemerintahan Umum			"Risiko" yang Teridentifikasi					Analisis Risiko Sebelum Pengendalian					Pengendalian yang telah ada (pengendalian terpasang)		Analisis Risiko pasca pengendalian			
No.	Program/Kegiatan	Resiko	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko													Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	c	d	e													c	d	e
I	Risiko Operasional																				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Ketidaksesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	ROO.25.35.03.01	4	4	19											Penyusunan action plan atas setiap rekomendasi		4	2	13
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan tidak tepat sasaran	ROO.25.35.03.02	4	4	19											Penyusunan PKPT berbasis Risiko		4	3	17
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pelaksanaan Pengawasan tidak tepat waktu	ROO.25.35.03.03	3	5	18											Penyusunan PKPT berbasis Risiko		3	3	14
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Keterbatasan waktu pelaksanaan pengawasan	ROO.25.35.03.04	3	5	18											Penyusunan PKPT berbasis Risiko		3	3	14
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP Audit dengan tujuan tertentu	ROO.25.35.03.05	4	4	19											Penyusunan action plan atas setiap rekomendasi		4	2	13
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku	ROO.25.35.03.06	5	4	24											Penyusunan Kendali Mutu Audit		5	3	22
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan tidak objektif	ROO.25.35.03.07	5	3	22											Pembuatan Pakta Integritas atas setiap pemeriksaan		5	2	21
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Keterlambatan Penyusunan laporan	ROO.25.35.03.08	4	4	19											Penetapan waktu pemeriksaan dalam PKPT		4	3	17
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	terjadinya kasus pungli di Lingkungan Pemerintah Daerah	ROO.25.35.03.09	4	3	17											Pencanangan Saber Pungli		4	2	13
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Manajemen Risiko belum dilaksanakan oleh OPD	ROO.25.35.03.10	4	4	19											Penyusunan Perbup 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko		4	3	17
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Penyaljian kebijakan teknis tidak tepat waktu	ROO.25.35.03.11	3	4	16											Koordinasi internal membahas isu strategis		3	3	14
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Penetapan obyek pemeriksaan belum berdasarkan risiko	ROO.25.35.03.12	3	4	16											Penyusunan PKPT berbasis Risiko		3	3	14
	Pendampingan dan Asistensi	Perbedaan rekomendasi atas kondisi yang sama/mirip	ROO.25.35.03.13	4	4	19											Penyusunan template PKA, KKA, dan LHP atas materi sejenis		4	2	13
	Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan kasus fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.35.03.14	4	3	17											Penetapan Peraturan Bupati tentang Wistle Blower System		4	2	13
	Pendampingan dan Asistensi	Adanya benturan kepentingan dalam pelayanan pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.35.03.15	4	3	17											Penetapan Peraturan Bupati tentang Benturan Kepentingan		4	2	13
	Pendampingan dan Asistensi	Penyaljian bukti dukung ZI / WBK / WBBM tidak tepat	ROO.25.35.03.16	3	3	14											Koordinasi dengan Perangkat Daerah		3	3	14
	Pendampingan dan Asistensi	belum semua PD melaporkan gratifikasi	ROO.25.35.03.17	3	4	16											Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu indikator pemenuhan dokumen Koruspah KPK		3	3	14
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu	ROO.25.35.03.18	3	3	14											Koordinasi Internal		3	2	11
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan	ROO.25.35.03.19	4	3	17											Koordinasi Internal		4	1	8
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyaljian perencanaan tidak tepat waktu	ROO.25.35.03.20	4	2	13											Koordinasi Internal		4	1	8
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketidaksesuaian penyaljian anggaran dengan SHBJ	ROO.25.35.03.21	4	2	13											Pencantuman anggaran dengan SHBJ terbaru		4	1	8

Daftar Risiko Prioritas

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah		: 2025		: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal				
Tahun Penilaian				: Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat				
Tujuan Strategis				: Urusan Pemerintahan Umum				
Urusan Pemerintahan								
Program/Kegiatan		Risiko Prioritas		Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak	
No			Risiko					Kode Risiko
a	b			c	d	e	f	g
I Risiko Operasional								
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Ketidaksesuaian tindak lanjut rekomendasi yang disajikan dalam LHP	ROO.25.35.03.01	13	Auditor, Sekretaris	kurangnya pemahaman auditor atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Keterlambatan penyajian tindak lanjut hasil pemeriksaan	
2	Penyelenggaraan Internal	Pengawasan tidak tepat sasaran	ROO.25.35.03.02	17	Kasubbag Perencanaan, Auditor dan P2UPD	Belum disusun manajemen risiko pada Audit, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Pengawasan internal tidak optimal	
3	Penyelenggaraan Internal	Pelaksanaan Pengawasan tidak tepat waktu	ROO.25.35.03.03	14	Kasubbag Evaluasi Pelaporan, Auditor dan P2UPD	Auditan belum lengkap menyajikan bahan revidi	Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Reviu	
4	Penyelenggaraan Internal	Keterbatasan pelaksanaan pengawasan	ROO.25.35.03.04	14	Kasubbag Evaluasi Pelaporan, Auditor dan P2UPD	Auditan belum lengkap menyajikan bahan revidi	Hasil pengawasan tidak optimal	
5	Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	Ketidaksesuai tindak lanjut rekomendasi yang disajikan dalam LHP Audit dengan tujuan tertentu	ROO.25.35.03.05	13	Kasubag Evaluasi Pelaporan	kurangnya pemahaman auditor atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	target waktu tindak lanjut tidak tercapai	

No	Risiko Prioritas			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko				
6	Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku	ROO.25.35.03.06	22	Inspektur	Kurangnya kompetensi auditor	Tujuan audit tidak tercapai
7	Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan pemeriksaan objektif	ROO.25.35.03.07	21	Inspektur	Fraud	Tujuan audit tidak tercapai
8	Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Keterlambatan Penyusunan laporan	ROO.25.35.03.08	17	Kasubag Evaluasi Pelaporan	Kurangnya koordinasi dan pemberdayaan Satgas	target tidak tercapai
9	Penyelenggaraan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan terjadinya kasus pungli di Lingkungan Pemerintah Daerah	ROO.25.35.03.09	13	Inspektur	Integritas SDM	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara
10	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Manajemen Risiko belum dilaksanakan oleh OPD	ROO.25.35.03.10	17	Sekretaris	Keterbatasan pengetahuan OPD	Pengendalian atas risiko kegiatan tidak optimal
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu	ROO.25.35.03.11	14	Kasubag Evaluasi Pelaporan	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	tujuan kebijakan teknis tidak tercapai secara optimal
12	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Penetapan pemeriksaan belum berdasarkan risiko	ROO.25.35.03.12	14	Kasubag Evaluasi Pelaporan	Belum disusun manajemen risiko pada Audit, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Pelaksanaan pemeriksaan tidak optimal
13	Pendampingan dan Asistensi	Perbedaan rekomendasi atas kondisi yang sama/mirip	ROO.25.35.03.13	13	Auditor	Perbedaan persepsi tim pendamping Kalurahan/OPD dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi	Penurunan kepercayaan publik
14	Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan kasus fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.35.03.14	13	Inspektur Pembantu	Animo pegawai dalam melaporkan fraud rendah	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara

No	Risiko Prioritas			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko				
15	Pendampingan dan Asistensi	Adanya kepentingan pelayanan pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.35.03.15	13	Inspektur Pembantu	kurangnya pemahaman terhadap mekanisme penanganan benturan	Pelayanan Pemerintah daerah tidak obyektif
16	Pendampingan dan Asistensi	Penyajian bukti dukung ZI / WBK / WBBM tidak tepat	ROO.25.35.03.16	14	Inspektur Pembantu	Kurangnya pemahaman dari PD terpilih	hasil evaluasi ZI WBK rendah
17	Pendampingan dan Asistensi	belum semua PD melaporkan gratifikasi	ROO.25.35.03.17	14	Inspektur	kurangnya pemahaman terhadap Mekanisme pelaporan gratifikasi	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara
18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penatausahaan keuangan tidak akuntabel	ROO.25.35.03.22	13	Kepala Subbag Umum	verifikasi berjenjang kurang optimal	Merugikan Pemerintah Daerah
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kemahalan harga pengadaan	ROO.25.35.03.27	14	Kepala Subbagian Umum	Fraud	Merugikan Pemerintah Daerah
II Risiko Strategis							
Tujuan: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang Handal							
1	Sasaran: 1.1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	RSO.25.35.03.01	19	Inspektur	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Pemerintah Daerah

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Perangkat Daerah Tahun Penilaian Tujuan Strategis		: Inspektorat Daerah : 2025 : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal : Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat : Urusan Pemerintahan Umum							
Urusan Pemerintahan		Risiko Prioritas			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
No	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h		
I Risiko Operasional									
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Ketidaksesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	ROO.25.35.03.01	Penyusunan action plan atas setiap rekomendasi	kekurangpahaman auditor	Monitoring tindak lanjut	Kasubbag Evlap	Januari-Desember	
2	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan tidak tepat sasaran	ROO.25.35.03.02	Penyusunan PKPT berbasis Risiko	PKPT belum sepenuhnya berdasarkan risiko masing-masing OPD	Pelaksanaan pendampingan Manajemen Risiko OPD dan Pemerintah Daerah	Inspektur	Juni	
3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pelaksanaan Pengawasan tidak tepat waktu	ROO.25.35.03.03	Penyusunan PKPT berbasis Risiko	Kesalahan perhitungan beban tim	Peningkatan koordinasi internal dalam penyusunan PKPT	Sekretaris	Januari	
4	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Keterbatasan waktu pelaksanaan pengawasan	ROO.25.35.03.04	Penyusunan PKPT berbasis Risiko	Kesalahan perhitungan beban pengawasan	Peningkatan koordinasi internal dalam penyusunan PKPT	Sekretaris	Januari	
5	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Ketidaksesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP Audit dengan tujuan tertentu	ROO.25.35.03.05	Penyusunan action plan atas setiap rekomendasi	kekurangpahaman auditor	Monitoring tindak lanjut	Kasubbag Evlap	Januari-Desember	
6	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku	ROO.25.35.03.06	Penyusunan Kendali Mutu Audit	Kurangnya kompetensi auditor	Peningkatan kompetensi secara berkala	Sekretaris	Januari-Desember	

		Risiko Prioritas			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
No	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h		
7	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pemeriksaan tidak objektif	ROO.25.35.03.07	Pembuatan Pakta Integritas atas setiap pemeriksaan	Kepentingan pribadi	Inspektur	Peningkatan koordinasi dalam rangka internalisasi kode etik, penguatan WBS, Penguatan pelaporan gratifikasi, meminimalisir benturan kepentingan dalam pemeriksaan di lingkungan Inspektorat Daerah	Januari-Desember	
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Keterlambatan Penyusunan laporan	ROO.25.35.03.08	Penetapan waktu pemeriksaan dalam PKPT	penguasan diwaktu yang sama	Sekretaris	Peningkatan koordinasi internal dalam penyusunan PKPT	Januari	
9	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	terjadinya kasus pungli di Lingkungan Pemerintah Daerah	ROO.25.35.03.09	Pencanangan Saber Pungli	Keterbatasan pelaksanaan monitoring	Inspektur	Penguatan WBS, penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan	Januari-Desember	
10	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Manajemen Risiko belum dilaksanakan oleh OPD	ROO.25.35.03.10	Penyusunan Perbup 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko	kurangnya pemahaman pelaksanaan manajemen risiko	Irban	Sosialisasi penyusunan Manajemen Risiko	Juni	
11	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu	ROO.25.35.03.11	Koordinasi internal membahas isu strategis	Perbedaan persepsi, aturan yang berubah	Inspektur	Peningkatan koordinasi internal, peningkatan kompetensi	Januari-Desember	
12	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Penetapan obyek pemeriksaan belum berdasarkan risiko	ROO.25.35.03.12	Penyusunan PKPT berbasis Risiko	Perubahan risiko	Inspektur	penyusunan MR update setiap tahun	Juni	
13	Pendampingan dan Asistensi	Perbedaan rekomendasi atas kondisi yang sama/mirip	ROO.25.35.03.13	Penyusunan template PKA, KKA, dan LHP atas materi sejenis	Perbedaan persepsi	Inspektur Pembantu	Peningkatan koordinasi sebelum pelaksanaan penugasan	Januari-Desember	

No	Risiko Prioritas			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko					
a	b	c	d	e	f	g	h	
14	Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan kasus fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.35.03.14	Penetapan Peraturan Bupati tentang Wistle Blower System	integritas pegawai	Peningkatan koordinasi dalam rangka internalisasi kode etik, penguatan WBS, Penguatan pelaporan gratifikasi, meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektur	Juli-Desember
15	Pendampingan dan Asistensi	Adanya benturan kepentingan dalam pelayanan pemerintah Kabupaten Gunungkidul	ROO.25.35.03.15	Penetapan Peraturan Bupati tentang Benturan Kepentingan	integritas pegawai	Peningkatan koordinasi dalam rangka internalisasi kode etik, penguatan WBS, Penguatan pelaporan gratifikasi, meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektur	Juli-Desember
16	Pendampingan dan Asistensi	Penyajian bukti dukung ZI / WBK / WBBM tidak tepat	ROO.25.35.03.16	Koordinasi dengan Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman	Pendampingan ZI WBK untuk OPD terpilih	Inspektur Pembantu	Maret
17	Pendampingan dan Asistensi	belum semua PD melaporkan gratifikasi	ROO.25.35.03.17	Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu indikator pemenuhan dokumen KORSUPGAK KPK	integritas pegawai	Peningkatan koordinasi dalam rangka internalisasi kode etik, penguatan WBS, Penguatan pelaporan gratifikasi, meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektur	Juli-Desember

No	Risiko Prioritas			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program/Kegiatan	Risiko	Kode Risiko					
a	b		c	d	e	f	g	h
18	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penatausahaan keuangan tidak akurat	ROO.25.35.03.22	Verifikasi berjenjang	Keterbatasan SDM	Peningkatan kompetensi pegawai dan proses verifikasi berjenjang	Sekretaris	Januari-Desember
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kemahalan harga pengadaan	ROO.25.35.03.27	Verifikasi berjenjang	integritas pegawai	Peningkatan koordinasi dalam rangka internalisasi kode etik, penguatan WBS, Penguatan pelaporan gratifikasi, meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Inspektorat Daerah	Sekretaris	Januari-Desember
III Risiko Strategis								
Tujuan: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang								
1	Sasaran: 1.1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	RSO.25.35.03.01	Sosialisasi SPIP	pengendalian internal belum terdokumentasi	pendampingan penyusunan Manajemen risiko pada OPD dan Pemerintah Daerah	Inspektur	Juni

Gunungkidul, 24 Juni 2024
Ketua UPR Inspektorat Daerah



Saptoyo, S. Sos, M. Si
NIP. 197103251991011001

